



PERSEPSI PETANI TEBU TERHADAP PENERAPAN SISTEM PEMBELIAN TEBU (SPT): STUDI KASUS DI KABUPATEN SITUBONDO

SUGARCANE FARMERS' PERCEPTIONS OF THE APPLICATION OF THE SUGAR CANE PURCHASING SYSTEM (SPT): CASE STUDY IN SITUBONDO REGENCY

Annur Galih Yusvianto^{1*}, Ebban Bagus Kuntadi²

^{1,2} Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Jember, Jl. Kalimantan 37 Jember, Indonesia

*Corresponding author's email: ¹⁾ annurgalihyusvianto@gmail.com

Submitted: 07/03/2022

Revised: 19/07/2022

Accepted: 31/07/2022

ABSTRACT

Sugarcane is one of the leading plantation commodities in Situbondo Regency, especially in the Asembagus District. Generally, sugarcane farmers sell sugar cane to sugar factories using a profit-sharing system (SBH). In 2019, the government implemented a new partnership system for sugar cane farmers and sugar factories, namely the sugar cane purchase system (SPT), which will replace the profit-sharing system (SBH). This study aims to determine the perception of sugarcane farmers on implementing the sugarcane purchasing system (SPT) and the factors influencing the perceptions of sugarcane farmers in the Asembagus District. This research method is descriptive-analytic with measurement tools using a Likert scale and data analysis using multiple linear regression. The results showed 1) The perception of sugarcane farmers towards implementing the sugarcane purchasing system (SPT) was expressed by several indicators that cumulatively had a score of 3.777 out of 7.380, where sugarcane farmers perceived that the implementation of the SPT system, in general, had a positive impact. 2) The factors that influence the perception of sugarcane farmers have met the classical assumption test with the factors that significantly influence the length of farming, farmer education, and job diversification. In contrast, the non-significant factors are farmer age, land area, and land status.

Keywords: *sugarcane, sugarcane purchasing system (SPT), perception*

ABSTRAK

Tebu merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan di Kabupaten Situbondo, khususnya di Kecamatan Asembagus. Umumnya petani tebu menjual tebu kepada pabrik gula dengan menggunakan sistem bagi hasil (SBH). Pada tahun 2019, pemerintah menerapkan sistem kemitraan baru bagi petani tebu dan pabrik gula, yaitu sistem pembelian tebu (SPT) yang kedepan akan menggantikan sistem bagi hasil (SBH). Penelitian ini bertujuan mengetahui persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT) serta faktor yang mempengaruhi persepsi petani tebu di Kecamatan Asembagus. Metode penelitian ini deskriptif analitik dengan alat pengukuran menggunakan skala likert dan analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan 1) Persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT) dinyatakan dengan beberapa indikator yang kumulatif memiliki skor sebesar 3.777 dari 7.380, dimana petani tebu berpersepsi bahwa penerapan sistem SPT secara umum memberikan dampak positif. 2) Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani tebu telah memenuhi uji asumsi klasik dengan faktor-faktor yang berpengaruh signifikan adalah lama berusahatani, pendidikan petani dan diversifikasi pekerjaan, sedangkan faktor yang tidak signifikan adalah usia petani, luas lahan dan status lahan.

Kata kunci: *tebu, sistem pembelian tebu (SPT), persepsi*



Copyright © 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

License. All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions.

How to Cite: Yusvianto, A. G., Kuntadi, E. B. (2022). Persepsi Petani Tebu Terhadap Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT): Studi Kasus di Kabupaten Situbondo. *Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian (J-SEP)*, 15(2): 229-246.

PENDAHULUAN

Menurut (Tunjungsari 2014; Zainuddin and Wibowo 2018), tebu merupakan salah satu komoditas yang cukup strategis dan berperan penting di sektor pertanian dalam perekonomian nasional. Komoditas tebu dapat disejajarkan dengan tanaman pangan terkait dengan urgensi penyediaannya, dikarenakan komoditas tebu merupakan bahan baku pembuatan gula. Sehingga peningkatan permintaan gula berdampak langsung dalam pengembangan perkebunan komoditas tebu. Dalam pemenuhan permintaan akan tebu, Indonesia didukung oleh beberapa daerah sentra produksi tebu. Provinsi Jawa Timur merupakan provinsi dengan produksi tebu tertinggi sebesar 1.050.874 ton dengan luas area tebu mencapai 176.871 Ha. Dengan jumlah produksi sebesar itu, provinsi Jawa Timur telah memproduksi 47% dari jumlah total produksi tebu di Indonesia. Produksi tebu Jawa Timur yang tinggi tersebut tercapai akibat dukungan dari beberapa kabupaten/kota yang memiliki potensi untuk memproduksi tebu. Berikut merupakan produksi tebu kabupaten di provinsi Jawa Timur :

Tabel 1. Produksi Tebu menurut Kabupaten di Jawa Timur Tahun 2015-2019 (Ton)

Kabupaten	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Malang	277.489	221.205	218.361	238.152	237.256
Kediri	163.921	144.363	143.519	156.831	156.204
Lumajang	70.481	100.885	100.041	102.366	101.750
Jombang	55.062	49.227	46.479	53.060	52.440
Mojokerto	51.814	51.165	48.417	56.581	55.016
Magetan	47.876	42.156	41.408	41.331	40.122
Situbondo	47.563	39.052	38.304	48.625	48.012
Jember	44.296	47.218	46.374	38.152	36.010
Blitar	36.630	37.152	36.724	39.256	39.028
Ngawi	32.556	31.568	30.820	28.152	28.086
Lainnya	379.645	271.166	260.000	264.122	256.950
Jawa Timur	1.207.333	1.035.157	1.010.447	1.066.628	1.050.874

Sumber : (Badan Pusat Statistik 2020)

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa terdapat 10 kabupaten yang memiliki potensi untuk memproduksi tebu dengan rata-rata produksi di atas 30.000 ton per tahunnya dan mampu menopang produksi tebu Jawa Timur. Kabupaten Malang merupakan salah satu Kabupaten yang dapat memproduksi tebu tertinggi dibanding sembilan Kabupaten lainnya yang mencapai rata-rata produksi sebesar 238.493 ton selama 2015-2019. Kabupaten Situbondo sebagai salah satu kabupaten penghasil tebu tertinggi di Jawa timur dengan produksi pada tahun 2018 sebesar 48.625 ton membuat Situbondo menjadi produsen tebu terbesar ke-6 se-Jawa Timur. Capaian tersebut didukung oleh keadaan alam dan sosial. Kabupaten Situbondo merupakan wilayah yang masih memiliki lahan pertanian yang luas serta mata pencaharian masyarakatnya mayoritas sebagai petani. Hal tersebut dapat menjadi salah satu indikator bahwa tanaman tebu merupakan komoditas perkebunan yang memiliki potensi produksi di Kabupaten Situbondo. Jumlah produksi tebu di Kabupaten Situbondo yang tinggi tersebut didukung oleh empat belas kecamatan yang memproduksi tebu yang terdiri dari Kecamatan Besuki, Kecamatan Suboh, Kecamatan Mlandingan, Kecamatan Bungatan, Kecamatan Kendit, Kecamatan Panarukan, Kecamatan Situbondo, Kecamatan Mangaran, Kecamatan Panji, Kecamatan Kapongan, Kecamatan Arjasa, Kecamatan Jangkar, Kecamatan Asembagus dan Kecamatan Banyuputih, dengan jumlah produksi tebu yang berbeda-beda di tiap kecamatan. Berikut merupakan produksi tebu di Kabupaten Situbondo:

Tabel 2. Produksi Tebu menurut Kecamatan di Situbondo Tahun 2015-2019 (Ton)

Kecamatan	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Besuki	16	24	190	54	60
Suboh	31	27	0	35	39
Mlandingan	94	90	52	47	52
Bungatan	14	26	178	97	101
Kendit	4.440	2.469	2.253	2.830	2.809
Panarukan	5.065	3.639	4.410	6.132	5.527
Situbondo	1.452	1.058	179	402	443
Mangaran	1.486	733	374	801	885
Panji	115	488	1.113	295	326
Kapongan	1.293	640	651	1.232	1.360
Arjasa	1.406	1.012	1.521	2.761	3.097
Jangkar	6.899	5.288	7.991	11.626	11.412
Asembagus	17.036	15.373	13.750	17.104	16.789
Banyuputih	8.216	8.185	5.643	5.209	5.113
Situbondo	47.563	39.052	38.304	48.625	48.012

Sumber : (Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo 2020)

Berdasarkan Tabel 2, dapat diketahui bahwa produksi tebu di Kabupaten Situbondo cenderung fluktuatif. Produksi tersebut bersumber dari empat belas kecamatan yang memproduksi tanaman tebu. Kecamatan Suboh merupakan kecamatan yang memproduksi tebu terendah di Kabupaten Situbondo, di mana rata-rata produksi tebu dari tahun 2015-2019 sebesar 26ton per tahun. Kecamatan Asembagus merupakan kecamatan yang memproduksi tebu tertinggi di Kabupaten Situbondo, di mana rata-rata produksinya dari tahun 2015-2019 sebesar 16.010-ton tebu atau menyumbang sebesar 36% dari total produksi tebu di Kabupaten Situbondo. Jumlah produksi tebu di Kecamatan Asembagus yang tinggi dapat menjadi salah satu indikator bahwa Kecamatan Asembagus berpotensi dalam budidaya tanaman tebu. Potensi tersebut juga didukung oleh adanya fasilitas pascapanen yaitu PG Asembagus berada di bawah naungan BUMN yaitu PTPN XI.

Petani tebu di Kecamatan Asembagus dalam menjual hasil panennya pada PG Asembagus pada umumnya sejak dulu dilakukan melalui sistem bagi hasil (SBH). Sistem bagi hasil dilaksanakan sesuai dengan SK Menteri Pertanian Nomor: 04/SK/Mentan/Bimas/IV/1992 tentang ketentuan bagi hasil tebu rakyat (TR) yang diolah pabrik gula. Persentase bagi hasil yang diterapkan sesuai SK menteri di mana untuk petani sebesar 66% dan untuk PG Asembagus sebesar 34%. Pada sistem bagi hasil petani tebu mendapatkan beberapa keuntungan antara lain adalah adanya penyuluhan teknis, penyediaan bibit unggul dan sarana produksi, penghubung (avalis) dalam pemberian kredit kepada para petani, serta pembagian natura dan kepastian pasar bagi petani saat panen. Pada sistem pembagian hasil, proses pembelian tebu oleh PG Asembagus dilakukan secara sistem DO (*Delivery Order*) di mana petani akan menerima uang saat gula hasil pengolahan tebu petani telah laku dijual saat pelelangan. Petani mitra akan menerima uang hasil panen tebu minimal paling cepat sekitar dua minggu setelah diserahkan ke PG Asembagus (Astuti, F.W.; Juita 2016)

Pada tanggal 19 Juli 2019, Kementerian Pertanian mengeluarkan Surat Edaran No. 593/TL.050/E/7/2019 perihal Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT). Surat edaran tersebut berisikan perihal sistem baru yang dilakukan secara beli putus. Sistem Pembelian Tebu (SPT) dalam jangka panjang akan menggantikan sistem bagi hasil

(SBH) yang telah lama dijalankan. Sistem beli putus ini akan secara merata akan diterapkan kepada semua PG, baik PG yang dinaungi oleh BUMN maupun Swasta, termasuk PG Asembagus. PG Asembagus merupakan satu-satunya pabrik gula di Situbondo yang telah menerapkan dan mensosialisasikan Sistem Pembelian Tebu (SPT) pada musim giling 2020.

Penerapan sistem pembelian tebu (SPT) di PG Asembagus tersebut akan sangat berdampak pada usaha tani tebu khususnya petani tebu di Kecamatan Asembagus. Hal tersebut disebabkan oleh mekanisme Sistem Pembelian Tebu (SPT), di mana pada sistem ini meskipun penerimaan hasil penjualan tebu lebih cepat serta mendapat kepastian harga jual minimal berdasarkan harga pembelian tebu pekebun (HPP) yang ditetapkan pemerintah, namun sistem ini membuat hubungan petani dan PG Asembagus hanya sekedar hubungan transaksi atau jual beli biasa dan menghilangkan prinsip-prinsip kemitraan yang telah dibangun oleh petani dan PG Asembagus. Sistem Pembelian Tebu (SPT), dalam pelaksanaannya, akan menghilangkan atau meniadakan fasilitas yang diberikan pada sistem bagi hasil (SBH) berupa penyediaan sarana produksi yang meliputi bantuan penyediaan bibit varietas unggul, pemberian bantuan analisa kemasakan, peminjaman traktor dan pengupayaan persediaan pupuk. Selain itu dengan penerapan sistem pembelian tebu (SPT), petani tidak lagi memperoleh bimbingan teknis serta pelatihan tentang budidaya tebu dari PG serta tidak mendapatkan pembagian natura atau gula dan pembagian tetes. Penerapan sistem pembelian tebu (SPT) juga akan mempengaruhi petani dalam pengadaan modal usaha, di mana pada sistem bagi hasil (SBH) PG membantu petani dengan meminjamkan modal kerja (kredit) petani kepada bank di mana PG bertindak sebagai avalis (penjamin dana) namun fasilitas tersebut tidak terdapat pada sistem pembelian tebu (SPT) atau dengan kata lain dengan Sistem Pembelian Tebu (SPT) petani tebu menjalankan usaha taninya secara mandiri tanpa ada bantuan dari PG.

Berdasarkan fenomena di atas, dapat diketahui bahwa penerapan sistem pembelian tebu (SPT) akan memunculkan berbagai perubahan atau permasalahan pada usaha tani tebu, terutama pada penghapusan fasilitas-fasilitas yang ada di sistem sebelumnya dan berdampak kepada petani tebu di Kabupaten Situbondo secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena tersebut tentunya akan membentuk persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT) yang dapat berpengaruh pada cara petani untuk mengambil keputusan dalam berusaha tani. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti terkait persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT) di Kabupaten Situbondo. Penelitian terkait dengan sistem pembelian tebu sudah pernah dilakukan oleh (Ferhat 2021) yang berfokus pengaruh sistem pembelian tebu terhadap insentif yang diterima oleh petani. Adapun penelitian ini berfokus pada persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT) di Kabupaten Situbondo.

METODE PENELITIAN

Metode penentuan lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive method*, yaitu di Kecamatan Asembagus. Pertimbangan peneliti memilih Kecamatan Asembagus adalah fokus penelitian terkait persepsi petani tebu, sehingga dasar peneliti menentukan daerah dengan mempertimbangkan jumlah petani tebu. Jumlah rumah tangga usaha perkebunan komoditas tebu terbesar di Kabupaten Situbondo terletak di Kecamatan Asembagus. Kecamatan Asembagus juga merupakan kecamatan yang memiliki jumlah produksi terbesar di Kabupaten Situbondo serta

kecamatan yang berdekatan langsung dengan PG. Asembagus, dimana PG Asembagus merupakan satu-satunya PG di Kabupaten Situbondo yang telah menerapkan Sistem Pembelian Tebu (SPT) sejak tahun 2020. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* merupakan suatu metode penentuan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu, dimana sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah petani tebu yang telah atau pernah menggunakan sistem pembelian tebu (SPT) dalam usahataniannya. Penentuan jumlah sampel yang diteliti menggunakan rumus Slovin agar memperkecil jangkauan peneliti dengan rumus sebagai berikut (Harahap, Sulardiono, and Suprpto 2018):

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

$$n = \frac{431}{1 + 431(0,1)^2}$$

$$n = 82$$

Keterangan:

- n = Jumlah sampel
- N = Jumlah populasi
- e = Toleransi eror (10%)

Berdasarkan hasil perhitungan rumus Slovin, dari populasi total sebanyak 431 orang petani tebu di Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo diperoleh jumlah sampel sebanyak 82 orang. Jumlah sampel sebanyak 82 orang responden dirasa sudah cukup mewakili populasi petani tebu di Kecamatan Asembagus. Penentuan jumlah sampel tersebut didukung oleh metode gay dan dhial yang menyatakan bahwa jumlah sample dalam penelitian deskriptif minimal berjumlah 10% dari total populasi serta penelitian yang bertujuan untuk menguji hubungan antar variabel minimal berjumlah 30 sampel. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah observasi, wawancara dan studi pustaka.

Rumusan masalah pertama penelitian adalah persepsi petani terhadap sistem pembelian tebu (SPT) di Kecamatan Asembagus. Rumusan masalah dianalisis menggunakan metode deskriptif dan analitik. Analisis deskriptif digunakan untuk menjelaskan variabel yang menjadi indikator persepsi petani yang meliputi sub sistem sarana produksi, sub sistem usaha tani, sub sistem agroindustri, dan sub sistem pemasaran. Variabel utama tersebut akan diuraikan menjadi variabel-variabel penjelas dalam mengidentifikasi persepsi petani yang dinilai dalam skala *likert*. Data yang dianalisis merupakan hasil wawancara dan observasi dalam bentuk kuesioner penelitian. Penggunaan skala *likert* bertujuan untuk menganalisis tingkat persepsi petani dalam bentuk angka atau membantu peneliti dalam mengkuantitatifkan data kualitatif. Pengkategorian jawaban pada skala *likert* terbagi pada rentang sangat setuju sampai sangat tidak setuju yang kemudian dikuantitatifkan dalam bentuk angka dengan pemberian bobot pada masing-masing jawaban. Adapun gradasi skala *likert* yang digunakan dalam penelitian dijabarkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Kategori dan bobot skala *likert*

Kategori	Bobot
Sangat setuju (SS)	5
Setuju (S)	4
Netral (N)	3
Tidak setuju (TS)	2
Sangat tidak setuju (STS)	1

Sumber : (Maryuliana, Subroto, and Haviana 2016)

Variabel utama yang ada meliputi sub sistem sarana produksi, sub sistem usaha tani, sub sistem agroindustri, dan sub sistem pemasaran kemudian diuraikan menjadi beberapa indikator. Indikator ini akan menjadi instrumen untuk menilai tingkat persepsi dari petani tebu. Beberapa indikator tersebut dijelaskan dalam Tabel 4 berikut:

Tabel 4. Variabel dan indikator persepsi petani tebu

No.	Variabel	Skala <i>Likert</i>				
		SS (5)	S (4)	N (3)	TS (2)	STS (1)
1.	Sub sistem sarana produksi Petani mengalami kendala dalam pengadaan bibit tebu Petani mengalami kendala dalam pengadaan pupuk subsidi Biaya pengadaan pupuk meningkat Petani mengalami kendala akses peminjaman traktor Biaya peminjaman traktor meningkat					
2.	Sub sistem usaha tani Jumlah pemberian pupuk menurun Jumlah tenaga kerja menurun Jumlah penyakit dan hama tebu meningkat Biaya olah lahan meningkat Hasil produksi tebu menurun					
3.	Sub sistem agroindustri Hasil rendemen tebu petani menurun Harga tebu petani menurun Petani lebih memilih menjual tebu ke pengepul daripada ke PG Pembayaran hasil tebu dibayarkan tidak tepat waktu Penghitungan hasil tebu petani tidak sesuai HPP Petani membutuhkan pembagian gula 10% Petani membutuhkan pembagian tetes					
4.	Sub sistem sarana pendukung Petani mengalami kendala akses kredit modal usaha tani Jumlah batas pinjaman kredit modal usaha tani menurun					

Sumber: Data primer (2022)

Rumusan masalah kedua mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani terhadap sistem pembelian tebu (SPT) di Kecamatan Asembagus. Rumusan masalah dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan variabel *dummy*. Variabel Y atau variabel terikat pada persamaan regresi linier berganda di penelitian ini adalah persepsi petani terhadap sistem pembelian tebu (SPT). Variabel X atau variabel yang mempengaruhi persepsi petani meliputi usia petani (tahun), pendidikan petani (tahun), lama berusaha tani (tahun), luas lahan (ha), status kepemilikan lahan (milik sendiri, sewa atau campuran) dan ada atau tidaknya diversifikasi pekerjaan. Variabel-variabel tersebut lalu diolah menggunakan regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \dots + \beta_n X_{ni} + \varepsilon_i$$

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_1 D_1 + \beta_2 D_2 + \varepsilon_i$$

Keterangan:

- Y = Persepsi petani tebu
 X_1 = Usia petani (Tahun)
 X_2 = Luas lahan (Ha)
 X_3 = Lama berusaha tani (Tahun)
 X_4 = Pendidikan petani (Tahun)
 D_2 = Status kepemilikan lahan (0:Milik sendiri; 1:Sewa; 2:Campuran)
 D_3 = Diversifikasi pekerjaan (0:Ada; 1:Tidak ada)
 β_0 = Konstanta
 β_n = Koefisien regresi
 ε = *Random error*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kecamatan Asembagus merupakan kecamatan di Kabupaten Situbondo yang terletak di bagian timur. Kecamatan Asembagus berbatasan langsung dengan Kecamatan Jangkar di sebelah barat, Kabupaten Bondowoso di sebelah selatan, Kecamatan Banyuputih di sebelah timur, dan Selat Madura di sebelah utara. Kecamatan Asembagus memiliki luas wilayah sebesar 118,74 km² dengan ketinggian 0-25m dari permukaan laut. Kecamatan Asembagus terdiri dari 10 desa dan terbagi menjadi 36 Dusun, 68 RW dan 1993 RT. Desa yang termasuk dalam wilayah administrasi Kecamatan Asembagus yaitu: Desa Mojosari, Kertosari, Kedunglo, Bantal, Awar Awar, Perante, Trigonco, Asembagus, Gudang dan Desa Wringin Anom. Jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Asembagus sebanyak 49.661 jiwa, di mana 24.167 jiwa berkelamin laki-laki dan 25.494 jiwa berkelamin perempuan. Desa dengan jumlah penduduk terbanyak adalah desa Asembagus dengan jumlah penduduk sebesar 6.750 jiwa, sedangkan desa yang memiliki jumlah penduduk terendah adalah Desa Mojosari dengan total penduduk sebanyak 4.028 jiwa.

Kecamatan Asembagus merupakan salah satu kecamatan yang memiliki pabrik gula terbesar di Kabupaten Situbondo, yaitu Pabrik Gula Asembagus. PG Asembagus merupakan salah satu pabrik gula yang beroperasi di bawah naungan PTPN XI. PG Asembagus didirikan pada tahun 1891 saat masa kolonial Belanda, kemudian diakuisisi oleh Pemerintahan Indonesia pada tanggal 12 Desember 1957. Lokasi Pabrik Gula Asembagus terletak di Desa Trigonco Timur, Kelurahan Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Wilayah kerja PTPN XI PG Asembagus berada di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Asembagus, Kecamatan Banyuputih, dan Kecamatan Jangkar, selain itu PG Asembagus juga mengembangkan luas wilayah kerjanya di Kab. Banyuwangi yakni di Daerah Benculuk yang ditanami tebu oleh PG Asembagus yang umum disebut dengan kebun Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola oleh PG yang disebut dengan Kebun Tebu Sendiri (TS) sedangkan tebu yang dikelola petani disebut Kebun Tebu Rakyat (TR). Luas lahan tebu sendiri (TS) PG Asembagus tersebar di tiga wilayah, yaitu di HGU Asembagus seluas 540 Ha, HGU Baluran Indah seluas 367 Ha, dan HGU Benculuk Banyuwangi seluas 850 Ha. Luas tebu rakyat (TR) yang bermitra dengan PG Asembagus seluas 4.450 Ha.

Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Sarana Produksi

Sub sistem sarana produksi pada usaha tani tebu meliputi segala pengadaan hingga penyaluran sarana produksi dan teknologi yang akan dibutuhkan dalam berbudidaya tanaman tebu. Pada penelitian ini peneliti menggunakan variabel sarana produksi yang meliputi bibit, pupuk, dan traktor. Ketiga variabel tersebut merupakan sarana produksi yang mana pada sistem SBH petani mendapatkan bantuan namun pada sistem SPT bantuan tersebut ditiadakan.

Tabel 5. Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Sarana Produksi

Indikator Sub Sistem Sarana Produksi	Penilaian Petani					Skor	Kategori
	SS	S	N	TS	STS		
Petani mengalami kendala dalam pengadaan bibit tebu	0	0	0	76	44	120	Sangat Rendah
Petani mengalami kendala dalam pengadaan pupuk subsidi	220	152	0	0	0	372	Sangat Tinggi
Biaya pengadaan pupuk meningkat	205	164	0	0	0	369	Sangat Tinggi
Petani mengalami kendala akses peminjaman traktor	0	0	81	54	28	163	Rendah
Biaya peminjaman traktor meningkat	0	180	111	0	0	291	Tinggi

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 5, dapat diketahui indikator petani mengalami kendala dalam pengadaan pupuk subsidi dan biaya pengadaan pupuk meningkat berada pada rentang skor 345.4 – 410 dan termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa petani setuju bahwa indikator tersebut sangat dipengaruhi oleh penerapan sistem SPT. Meskipun masuk dalam kategori sangat tinggi, petani tebu di kec. Asembagus masih dapat menerima pupuk subsidi sesuai luas lahan dan RDKK, namun petani mendapat kendala keterlambatan waktu kedatangan pupuk subsidi yang menyebabkan keterlambatan dalam pemupukan serta jatah jumlah pupuk subsidi tiap tahunnya dirasa mengalami penurunan yang memaksa petani untuk membeli pupuk non-subsidi guna memenuhi kebutuhan lahannya, hal tersebut mengakibatkan peningkatan pada biaya pengadaan pupuk petani. Indikator biaya peminjaman traktor meningkat berada pada rentang skor 279.8 - 344.4 dan termasuk pada kategori tinggi, Hal ini disebabkan mayoritas petani tidak lagi meminjam atau menyewa traktor dari PG melainkan dari KPTR dengan proses peminjaman dan birokrasi yang menurut petani lebih mudah meskipun harganya lebih tinggi dan pembayarannya di awal atau tidak potong DO

Indikator petani mengalami kendala akses peminjaman traktor berada pada rentang skor 148.6 - 213.2 dan termasuk pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa petani tidak setuju bahwa indikator tersebut dipengaruhi oleh penerapan sistem SPT. Hal ini disebabkan karena saat ini petani tidak lagi hanya mengandalkan peminjaman traktor dari PG, namun juga petani dapat meminjamnya dari beberapa KPTR yang berada di Kec. Asembagus, seperti KPTR Sumber Manis, KPTR Bumi Raya, dan KPTR Tani Maju. Indikator petani mengalami kendala dalam pengadaan bibit tebu berada pada rentang skor 82 - 147.6 dan termasuk pada kategori sangat rendah. Hal ini menunjukkan bahwa petani sangat tidak setuju bahwa indikator tersebut dipengaruhi oleh penerapan sistem SPT. Hal ini disebabkan petani tebu dalam pengadaan bibit tidak hanya membeli dari PG namun juga biasa membeli dari petani tebu lain dan juga terdapat petani tebu yang memproduksi bibit tebunya sendiri dari tanaman tebu sebelumnya guna menekan biaya produksi.

Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Usaha Tani

Sub sistem usaha tani pada budidaya tebu terdiri dari kegiatan mengolah lahan, penanaman bibit, pemeliharaan tanaman hingga ke proses panen. Proses olah lahan bertujuan untuk mengondisikan lahan agar tidak berupa bongkahan besar-besar sehingga dapat memperbaiki aerasi dan cocok untuk media tumbuh tanaman tebu. Penanaman bibit dilakukan setelah bibit telah selesai disemai dan siap untuk ditanam serta lahan telah dikondisikan. Proses pemeliharaan merupakan upaya untuk menjaga kondisi ideal bagi pertumbuhan tanaman tebu, beberapa kegiatan pada proses pemeliharaan adalah pemupukan dan pengendalian OPT. Pemanenan pada tanaman tebu dilakukan setelah tebu berumur 12 – 14 bulan setelah tanam. Penerapan sistem SPT menimbulkan perubahan pada pendapatan petani tebu. Perubahan pendapatan tersebut dapat mempengaruhi petani dalam pemberian input pertanian yang dibutuhkan dalam usaha tani tebu serta dapat mempengaruhi hasil produksi tebu petani. Berikut merupakan persepsi petani tebu pada sub sistem usaha tani:

Tabel 6. Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Usaha Tani

Indikator Sub sistem Usaha tani	Penilaian Petani					Skor	Kategori
	SS	S	N	TS	STS		
Jumlah pemberian pupuk menurun	0	112	72	60	0	244	Netral
Jumlah tenaga kerja menurun	0	0	0	78	43	121	Sangat Rendah
Jumlah penyakit dan hama tebu meningkat	0	0	138	72	0	210	Rendah
Biaya olah lahan meningkat	0	180	111	0	0	291	Tinggi
Hasil produksi tebu menurun	0	0	0	72	46	118	Sangat Rendah

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 6, dapat diketahui indikator, biaya olah lahan meningkat berada pada rentang skor 279.8 – 344.4 dan termasuk pada kategori tinggi. Hal ini disebabkan adanya peningkatan dari biaya sewa traktor, di mana pada proses olah lahan budidaya tebu memerlukan tiga kali pemakaian traktor pada proses bajak 1, bajak 2, dan pembuatan kairan. Indikator jumlah pemberian pupuk menurun berada pada rentang skor 214.2 - 278.8 dan termasuk pada kategori netral. Hal ini disebabkan karena kelangkaan pupuk bersubsidi tidak mempengaruhi petani dalam pemberian pupuk. Petani berpendapat bahwa mengurangi kuantitas pemberian pupuk dapat menghambat pertumbuhan tanaman tebu serta menyebabkan turunnya produksi. Petani memenuhi kebutuhan pupuknya dengan membeli pupuk non-subsidi ataupun mencampur pupuk subsidi dengan pupuk non subsidi dan bahkan terdapat beberapa petani yang mencari pupuk subsidi hingga keluar Kabupaten Situbondo meskipun hal tersebut tidak dapat dibenarkan, namun petani tetap melakukannya agar memenuhi kebutuhan pupuk tebunya. Mayoritas petani menggunakan pupuk ZA dan Phonska dalam budidaya tebunya, dengan perbandingan 6 kw pupuk ZA dan 4 kw pupuk Phonska per hektar.

Indikator jumlah penyakit dan hama tebu meningkat berada pada rentang skor 148.6 - 213.2 dan termasuk pada kategori rendah. Hal tersebut disebabkan karena menurut petani perbedaan sistem SPT dan SBH tidak mempengaruhi jumlah hama dan penyakit. Hama yang paling ditakuti oleh petani tebu di Kec. Asembagus adalah uret dikarenakan jika sudah terkena wabah uret petani tebu harus membongkar tanaman tebunya. Salah satu gangguan yang dikhawatirkan oleh petani tebu selain hama dan penyakit adalah pembakaran lahan yang masih sering terjadi di Kec. Asembagus.

Indikator jumlah tenaga kerja menurun, hasil produksi tebu menurun berada pada rentang skor 82 - 147.6 dan termasuk pada kategori sangat rendah. Hal tersebut disebabkan petani dalam penentuan jumlah tenaga kerja didasarkan pada kebutuhan lahannya. Hasil produksi tebu petani responden juga tidak mengalami penurunan yang signifikan hal tersebut karena petani masih mengusahakan tidak melakukan pengurangan dalam proses perawatan dan pemberian *agroinput*.

Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Agroindustri

Sub sistem agroindustri pada tanaman tebu merupakan seluruh kegiatan pada tahapan pascapanen yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah. Salah satu bentuk agroindustri dalam budidaya tebu adalah pengolahan tebu menjadi gula yang pada umumnya diproses oleh pabrik gula. Pemerintah mengeluarkan kebijakan terkait sistem kemitraan baru antara PG dan petani, di mana pada sistem sebelumnya petani mendapatkan hasil penjualan tebunya dengan cara bagi hasil dengan PG dari hasil lelang gula dan harga tebunya ditentukan berdasar rendemen, namun pada sistem SPT petani menjual tebu ke PG dengan sistem terputus dan harga tebunya ditentukan berdasar HPP yang ditetapkan. Penerapan sistem baru tersebut juga dapat mempengaruhi minat petani untuk menjual tebunya ke PG atau malah akan membuat petani penjual tebunya ke pengepul/pok-pokan. Persepsi petani terhadap sub sistem agroindustri ditunjukkan pada Tabel 7.

Tabel 7. Persepsi Petani Tebu Pada Sub sistem Agroindustri

Indikator Sub sistem Agroindustri	Penilaian Petani					Skor	Kategori
	SS	S	N	TS	STS		
Hasil rendemen tebu petani menurun	0	0	0	90	37	127	Sangat Rendah
Harga tebu petani menurun	0	0	0	88	38	126	Sangat Rendah
Petani lebih memilih menjual tebu ke pengepul daripada ke PG	0	0	0	78	43	121	Sangat Rendah
Pembayaran hasil tebu dibayarkan tidak tepat waktu	0	0	0	84	40	124	Sangat Rendah
Penghitungan hasil tebu petani tidak sesuai dengan HPP	0	0	0	100	32	132	Sangat Rendah
Petani membutuhkan pembagian gula 10%	0	88	87	62	0	237	Netral
Petani membutuhkan pembagian tetes	0	88	99	54	0	241	Netral

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui indikator petani membutuhkan pembagian gula 10% dan petani membutuhkan pembagian tetes berada pada rentang skor 214.2 - 278.8 atau termasuk pada kategori netral. Hal tersebut disebabkan menurut petani meskipun kedua indikator tersebut dapat menjadi pemasukan tambahan namun petani merasa pendapatan petani pada sistem SBH dan SPT tidak terlalu berbeda jauh dan menurut petani pembagian gula dan tetes tersebut didapat dari pemotongan pendapatan petani yang dipotong oleh PG dan dikembalikan dalam bentuk gula dan tetes, serta pada sistem SPT petani tebu masih dapat membeli gula pada PG dengan harga lelang dan jumlah yang dikehendaki petani agar meminimalisir stok gula petani yang tidak terjual. Indikator hasil rendemen tebu petani menurun, harga tebu petani menurun, petani lebih memilih menjual tebu ke pengepul daripada ke PG, pembayaran hasil tebu dibayarkan tidak tepat waktu, penghitungan hasil tebu petani tidak sesuai dengan HPP berada pada rentang skor 82 - 147.6 dan termasuk pada kategori sangat rendah. Hal tersebut disebabkan setelah penerapan sistem SPT, mayoritas petani responden tidak mengurangi *agroinput* dan perawatan tebunya, sehingga rendemen tebu petani tidak mengalami

penurunan. Pada sistem SPT, rendemen tebu masih menjadi salah satu acuan PG dalam menentukan harga tebu petani, selain itu pada sistem SPT penentuan harga tebu juga berdasarkan HPP ($R/7\% \times 510/kg$) yang telah ditetapkan oleh pemerintah untuk meminimalisir adanya pihak yang dirugikan. Pada sistem SPT penentuan rendemen menggunakan rendemen rata-rata per hari atau melihat laporan harian tebang (LHT) dari bagian *quality assurance* PG. Asebagus serta setelah dilakukannya revitalisasi, PG asebagus menggunakan alat *core sampler* untuk menentukan nilai rendemen tebu dengan cara mengambil nira dalam satu truk secara representatif. Rata-rata rendemen tebu harian petani di Kec. Asebagus adalah 7 hingga 9. Harga tebu di PG. Asebagus pada tahun 2021 adalah Rp. 54.000,-/Kw pada awal periode tebang dan Rp. 70.000,-/Kw pada akhir periode tebang. Pembayaran hasil tebu petani pada sistem SPT di Kec. Asebagus dapat dikategorikan tepat waktu, di mana pembayaran dilakukan setiap hari rabu melalui transfer antar bank, meskipun terdapat sedikit keterlambatan sekitar 2 minggu pada pembayaran periode tebang akhir namun hal tersebut menurut petani masih wajar karena tidak selama pembayaran pada sistem SBH yang dapat memakan waktu 1-2 bulan. Petani responden berpendapat dengan penerapan sistem SPT mengurangi minat petani untuk menjual ke pengepul/pok-pokan dikarenakan dengan perbedaan harga yang tidak seberapa petani lebih memilih untuk bermitra dengan PG dikarenakan untuk menjaga kemitraan yang telah lama dibangun.

Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Pendukung

Sub sistem pendukung merupakan sub sistem yang menunjang pengembangan agribisnis serta mendukung sub sistem-sub sistem agribisnis yang lain. Salah satu sub sistem pendukung lembaga perkreditan, di mana pada sistem SBH petani mendapat bantuan dalam pengajuan kredit modal usaha dari PG yang menjadi avalis/penjamin dana. Penerapan sistem SPT yang telah dijalankan mengubah beberapa kebijakan dalam sub sistem pendukung yang mana dapat mempengaruhi persepsi petani. Berikut merupakan tabel persepsi petani pada sub sistem pendukung.

Tabel 8. Persepsi Petani Tebu Pada Sub Sistem Pendukung

Sub Sistem Sarana Pendukung	Penilaian Petani					Skor	Kategori
	SS	S	N	TS	STS		
Petani mengalami kendala akses kredit modal usaha tani	0	0	0	82	41	123	Sangat Rendah
Jumlah batas pinjaman kredit modal usaha tani menurun	0	96	105	46	0	247	Netral

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 8, dapat diketahui indikator jumlah batas pinjaman kredit modal usaha tani menurun berada pada rentang skala 214.2 - 278.8 dan termasuk pada kategori netral karena tidak ada penurunan batas pinjaman kredit modal usaha untuk petani, di mana pada umumnya petani di Kab. Asebagus mengambil KUR untuk memenuhi modal usahanya dan batas maksimal pinjaman kreditnya adalah 100 juta. Indikator petani mengalami kendala akses kredit modal usaha tani berada pada rentang skor 82 - 147.6 dan termasuk pada kategori sangat rendah. Hal tersebut disebabkan karena pada sistem SPT, meskipun PG Asebagus tidak lagi berperan sebagai avalis, namun petani tebu masih dapat mengajukan peminjaman kredit modal usaha tani baik secara individu maupun kelompok asalkan petani tebu yang mengajukan pinjaman tidak memiliki masalah terhadap kredit di tempat lain.

Persepsi Petani Tebu Pada Penerapan Sistem SPT

Sistem SPT pada kemitraan usaha tani tebu merupakan sistem baru yang menggantikan sistem SBH. Penerapan sistem SPT tentunya menimbulkan berbagai persepsi pada petani tebu dikarenakan petani telah lama menerapkan sistem SBH serta terdapat perubahan yang diterapkan pada sistem SPT yang mengubah bentuk dan isi kemitraan antara petani dan PG. Perubahan tersebut dapat berpengaruh pada sub sistem agribisnis tebu dari sub sistem sarana produksi hingga sub sistem sarana pendukung. Persepsi petani terhadap penerapan sistem SPT secara menyeluruh dipaparkan pada Tabel 9

Tabel 9. Persepsi Petani Tebu Pada Penerapan Sistem SPT

Indikator	Penilaian Petani					Skor	Kategori
	SS	S	N	TS	STS		
Sub sistem Sarana Produksi	425	496	192	130	72	1315	Netral
Sub sistem Usaha tani	0	292	321	282	89	984	Berdampak Positif
Sub sistem Agroindustri	0	176	186	556	190	1108	Berdampak Positif
Sub sistem Sarana Pendukung	0	96	105	128	41	370	Berdampak Positif
Total	425	1060	804	1096	392	3777	Berdampak Positif

Sumber: Data primer diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 9, dapat diketahui bahwa persepsi petani tebu pada penerapan sistem SPT di Kecamatan Asembagus memiliki skor 3.777 dan berada pada rentang skor 2805.4 - 4050.8 serta nilai tersebut termasuk dalam kategori berdampak positif. Hasil persepsi petani terhadap penerapan sistem SPT diperoleh dari skor kumulatif empat indikator yang terdiri dari sub sistem sarana produksi, sub sistem usaha tani, sub sistem agroindustri, sub sistem sarana pendukung di mana rata2 hasil keempat indikator persepsi tersebut terkategori berdampak positif. Petani tebu menyatakan berdampak netral dan cenderung negatif setelah penerapan sistem SPT pada indikator sub sistem sarana produksi. Sementara persepsi petani tebu untuk indikator lainnya yang berkaitan dengan sarana produksi, usaha tani, agroindustri, dan sarana pendukung berada pada kategori netral hingga sangat rendah yang mengindikasikan bahwa indikator tersebut tidak menerima dampak negatif setelah penerapan sistem SPT.

Tingginya skor persepsi petani terhadap indikator sub sistem sarana produksi disebabkan indikator petani mengalami kendala dalam pengadaan pupuk subsidi. Petani merasa penerapan sistem SPT mempengaruhi alokasi jumlah pupuk subsidi dan terdapat beberapa petani yang tidak mendapat bagian serta menurut petani jumlah pupuk subsidi yang diterima tidak dapat mencukupi kebutuhan usaha taninya yang menyebabkan petani melakukan pembelian pupuk subsidi di luar kios yang telah ditunjuk serta terdapat beberapa petani yang membeli pupuk subsidi di luar daerah, namun hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Edaran No. 593/TL.050/E/7/2019 terkait penerapan sistem pembelian tebu (SPT) di mana pada sistem SPT, hubungan petani dan pabrik gula hanya sekedar transaksional atau jual beli biasa dan pabrik gula tidak lagi memberi bantuan atau fasilitas pada petani serta pabrik gula tidak memiliki wewenang dalam pengelolaan pupuk subsidi dan hal yang telah dilakukan petani tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2020 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2020 di mana kegiatan pembelian tersebut merusak alokasi pupuk subsidi yang telah ditentukan dan dapat

menyebabkan kelangkaan. Petani juga merasa penerapan sistem SPT mempengaruhi indikator biaya pengadaan pupuk meningkat, hal tersebut disebabkan beberapa petani yang menggunakan pupuk non-subsidi merasa terjadi peningkatan harga yang cukup signifikan, namun tidak sesuai dengan Surat Edaran No. 593/TI.050/E/7/2019 terkait penerapan sistem pembelian tebu (SPT), peningkatan harga pupuk non-subsidi lebih diakibatkan oleh melonjaknya permintaan serta tidak adanya aturan terkait harga eceran tertinggi (HET) untuk pupuk non-subsidi. Petani juga merasa penerapan sistem SPT berdampak pada indikator biaya peminjaman traktor meningkat yang dinyatakan dalam jumlah skor yang termasuk dalam kategori tinggi namun petani merasa sepadan dengan peningkatan pelayanan yang tepat waktu dalam penggarapan lahan petani.

Skor persepsi petani terhadap indikator sub sistem usaha tani yang terkategori berdampak positif disebabkan karena petani menilai bahwa keputusan untuk mengurangi input pertanian pada tanaman tebunya akan memberikan kerugian yang lebih besar pada pendapatan usaha taninya yang dapat menyebabkan gagal panen. Skor persepsi petani terhadap indikator agroindustri yang terkategori berdampak positif disebabkan karena petani menilai setelah penerapan sistem SPT, penilaian negatif petani terhadap penentuan rendemen tebu mulai berkurang serta petani dapat melihat harga jual tebunya di awal sebelum timbang dan proses pencairan dana yang relatif cepat dibanding sistem SBH meskipun petani tidak lagi mendapat pembagian gula dan tetes namun petani lebih suka bila tebu yang dijual dibayar dalam bentuk uang bukan barang serta dengan adanya sistem SPT petani tidak lagi menanggung risiko kehilangan hasil pengolahan tebu oleh pabrik gula. Rendahnya skor persepsi petani tebu terhadap indikator sub sistem pendukung disebabkan petani menilai bahwa tidak ada perubahan pada sub sistem pendukung khususnya pada bantuan pinjaman kredit usaha tani, di mana petani tidak mengalami kendala saat pengajuan pinjaman kredit baik individu maupun kelompok serta jumlah pinjaman yang dapat diajukan tidak berkurang.

Mayoritas petani menyatakan bahwa penerapan sistem SPT ataupun SBH memang memiliki perbedaan dalam pemberian fasilitas dan juga pendapatan petani, namun hal tersebut dirasa tidak terlalu berpengaruh signifikan oleh petani karena kedua sistem tersebut sama-sama memberikan keuntungan secara finansial bagi petani dan dapat menutupi biaya operasional budidaya tebunya. Petani tebu lebih menekankan pada durasi pencairan dananya, sebab pada sistem SBH di PG. Asembagus memerlukan waktu satu hingga dua, sedangkan pada sistem SPT pembayaran tebu dilakukan sekitar seminggu sekali karena yang dibutuhkan petani selain harga tinggi juga pembayaran tepat waktu atau cepat karena petani memiliki tanggungan yang perlu dibayar

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Petani Tebu Terhadap Penerapan Sistem Pembelian Tebu (SPT)

Analisis regresi linier berganda dengan variabel dummy digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani tebu di Kecamatan Asembagus terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT). Pada penelitian ini terdapat enam variabel independen yang diduga mempengaruhi nilai persepsi petani tebu yang terdiri dari variabel usia petani (X1), luas lahan (X2), lama berusaha tani (X3), pendidikan petani (X4), status lahan (D1) dan diversifikasi pekerjaan (D2). Sedangkan variabel-variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model persamaan dianggap konstan. Uji statistik yang digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen terdiri dari uji koefisien

determinasi (*adjusted R2*), uji F, dan uji T. Hasil analisis menggunakan alat bantu SPSS 25 disajikan pada Tabel 10 di bawah ini.

Tabel 10. Hasil regresi linier berganda pada faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi petani

Variabel	Koefisien Regresi	T – hitung	Sig
Usia Petani	0,117	1,011	0,315
Luas Lahan	-0,375	-1,694	0,094
Lama Berusaha tani	0,429	3,984	0,000
Pendidikan Petani	0,485	5,033	0,000
Status Lahan	0,743	1,424	0,159
Diversifikasi Pekerjaan	1,784	2,507	0,014
F – hitung	14,812		
F – tabel	2,22		
T – tabel	1,9921		
Sig. Uji F	0,000		
<i>Adjusted R-square</i>	0,506		

Sumber : Data Primer Diolah, 2021.

Berdasarkan Tabel 10, dapat diketahui nilai *adjusted R-square* sebesar 0,506 atau 51%. *Adjusted R-square* digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam model regresi. Nilai *adjusted R-square* tersebut menunjukkan bahwa variabel usia petani, luas lahan, lama berusaha tani, Pendidikan petani, status lahan dan diversifikasi pekerjaan mempengaruhi persepsi petani terhadap penerapan sistem SPT sebesar 51%, sedangkan 49% lainnya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Berdasarkan hasil analisis regresi linier berganda, susunan model persamaan nilai persepsi petani tebu adalah sebagai berikut

$$Y=18,663 +0.117X_1+0.375X_2+0.429X_3+0,485X_4+0.743D_1+1,784D_2$$

Nilai uji F pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas yang ada di dalam model mempengaruhi variabel terikat secara bersama-sama. Berdasarkan tabel, dapat diketahui nilai F-hitung pada model regresi sebesar 14,812, di mana nilai tersebut lebih besar dibanding nilai F-tabel yang sebesar 2,22. Nilai signifikansi uji F dari model regresi sebesar 0,000, di mana nilai tersebut lebih kecil dari nilai signifikansi pada model yang sebesar 0,05. Nilai F-hitung dan nilai signifikansi tersebut telah memenuhi kriteria signifikansi pada uji-F, yaitu nilai $F > F$ tabel, dan nilai signifikansi $< 0,05$. Apabila nilai signifikansi model lebih kecil 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, di mana terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara simultan. Berdasarkan model dapat diketahui bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak yang menunjukkan bahwa variabel usia petani, luas lahan, lama berusaha tani, pendidikan petani, status lahan dan diversifikasi pekerjaan secara simultan berpengaruh terhadap persepsi petani tebu.

Nilai uji-t pada penelitian ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel bebas pada model regresi berpengaruh secara parsial terhadap variabel terikat. Variabel bebas dapat dikategorikan berpengaruh secara parsial jika nilai t-hitung $> t$ -tabel dan nilai signifikansi uji-t $< 0,05$. Apabila nilai signifikansi model lebih kecil 0,05 maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, di mana terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen dan variabel dependen secara parsial. Variabel bebas pada model regresi yang diasumsikan mempengaruhi persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT) (Y) terdiri dari variabel usia petani (X_1), variabel luas lahan (X_2), variabel lama berusaha tani (X_3), variabel pendidikan petani (X_4), variabel status lahan

(D₁) dan variabel diversifikasi pekerjaan (D₂). Berikut merupakan hasil uji-t dari masing-masing variabel bebas dalam model regresi:

a. Usia Petani (X₁)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel usia petani (X₁) adalah 0,315 dan memiliki nilai t hitung sebesar 1,011. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 serta nilai t hitung dari variabel usia petani kurang dari nilai t tabel (1,9921), sehingga H₁ diterima dan H₀ ditolak yang didefinisikan secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel usia petani dan variabel persepsi petani tebu. Hal ini sesuai dengan penelitian terdahulu dari (Virianita et al. 2019) di mana usia petani tidak berkontribusi nyata dalam pembentukan persepsi petani terhadap dukungan pemerintah dalam penerapan sistem pertanian berkelanjutan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor usia bukanlah faktor yang berkontribusi dalam pembentukan persepsi petani terhadap sistem SPT, hal ini dikarenakan kesamaan pekerjaan, yaitu petani. Sesama petani tebu, walaupun memiliki usia yang berbeda-beda namun tetap menjalin komunikasi serta bertukar informasi terkait sistem pembelian tebu (SPT).

b. Luas Lahan (X₂)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel luas lahan (X₂) adalah 0,094 dan memiliki nilai t hitung sebesar 1,694. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 serta nilai t hitung dari variabel luas lahan kurang dari nilai t tabel (1,9921), sehingga H₁ diterima dan H₀ ditolak yang didefinisikan secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel luas lahan dan variabel persepsi petani tebu. Hal tersebut tidak sesuai dengan penelitian terdahulu dari (Ajatkan, Syathori, and Khoiriyah 2020) di mana luas lahan berpengaruh terhadap persepsi petani terhadap produksi tebunya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor luas lahan tidak mempengaruhi persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem SPT, karena baik itu petani tebu pemilik lahan luas maupun petani tebu pemilik lahan sempit di Kecamatan Asembagus dapat menerapkan sistem pembelian tebu (SPT).

c. Lama Berusaha tani (X₃)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel lama berusaha tani (X₃) adalah 0,000 dan memiliki nilai t hitung sebesar 3,984. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 serta nilai t hitung dari variabel lama berusaha tani lebih dari nilai t tabel (1,9921), sehingga H₀ diterima dan H₁ ditolak yang didefinisikan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel lama berusaha tani dan variabel persepsi petani tebu. Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Admin, Wicaksono, and Zulfanita 2012) di mana lama berusaha tani memiliki pengaruh terhadap persepsi dan partisipasi petani dalam program pengendalian hama terpadu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor lama berusaha tani mempengaruhi persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem SPT, karena semakin banyak pengalaman yang dimiliki oleh petani tebu, maka akan semakin baik pula mereka dalam mengolah atau menjalankan usaha taninya serta telah mengalami beberapa perubahan dan perkembangan sistem kemitraan pada usaha tani tebu. Petani tebu yang telah lama menggeluti usaha tani tebu akan menjadi lebih terampil dan cenderung menghasilkan suatu hasil yang lebih baik, sehingga pengalaman berusaha tani tersebut berpengaruh dalam pembentukan pandangan atau penilaian petani terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT).

d. Pendidikan Petani (X_4)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel pendidikan petani (X_4) adalah 0,000 dan memiliki nilai t hitung sebesar 5,033. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 serta nilai t hitung dari variabel luas lahan lebih dari nilai t tabel (1,9921), sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak yang didefinisikan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pendidikan petani dan variabel persepsi petani tebu. Hal ini sesuai dengan pernyataan (Virianita et al. 2019) bahwa adanya hubungan nyata antara pendidikan dan persepsi petani terhadap penerapan pertanian berkelanjutan. yang relatif tinggi menyebabkan petani lebih dinamis, Semakin tinggi pendidikan formal seseorang semakin mudah menerima dan memahami inovasi baru.

e. Status Lahan (D_1)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel status lahan (D_1) adalah 0,159 dan memiliki nilai t hitung sebesar 1,424. Nilai signifikansi tersebut lebih besar dari 0,05 serta nilai t hitung dari variabel luas lahan kurang dari nilai t tabel (1,9921), sehingga H_1 diterima dan H_0 ditolak yang didefinisikan secara parsial tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel status lahan dan variabel persepsi petani tebu. Hal ini tidak sesuai dengan penelitian terdahulu dari (Admin et al. 2012; Wahyuningsih and Hasan 2019) yang menyatakan bahwa status lahan memiliki hubungan yang nyata terhadap penerapan program PHT dan asuransi pertanian. Hasil penelitian ini menunjukkan status lahan tidak mempunyai korelasi yang nyata dengan persepsi terhadap penerapan sistem pembelian tebu sistem SPT. Artinya bahwa tidak ada perbedaan antara persepsi petani terhadap sistem SPT yang berstatus lahannya penyewa atau pemilik.

f. Diversifikasi Pekerjaan (D_2)

Hasil analisis regresi linier berganda menunjukkan bahwa nilai signifikansi uji t variabel diversifikasi pekerjaan (D_2) adalah 0,014 dan memiliki nilai t hitung sebesar 2,507. Nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,05 serta nilai t hitung dari variabel luas lahan lebih dari nilai t tabel (1,9921), sehingga H_0 diterima dan H_1 ditolak yang didefinisikan secara parsial terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel diversifikasi pekerjaan dan variabel persepsi petani tebu. Hal tersebut tidak sejalan dengan hasil penelitian dari (Mamilianti 2020), yang menyatakan bahwa variabel pekerjaan di luar pertanian menunjukkan pengaruh negatif namun tidak berpengaruh pada persepsi petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diversifikasi pekerjaan mempengaruhi persepsi petani dalam penerapan sistem pembelian tebu. Sebanyak 52 petani dari total 82 petani responden memiliki pekerjaan lain selain usaha tani tebu, hal tersebut dapat diartikan bahwa petani mencoba mencari pendapatan lain untuk cadangan jika terjadi fluktuasi harga atau kerugian di usaha tani tebunya. Petani yang memiliki sumber pendapatan lebih banyak akan lebih kuat dalam menghadapi risiko dan ketidakpastian dalam usaha taninya

KESIMPULAN

Persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem pembelian tebu (SPT) dinyatakan dengan beberapa indikator yang kumulatif memiliki skor sebesar 3.777 dari 7.380, di mana petani tebu berpersepsi bahwa penerapan sistem SPT secara umum memberikan dampak positif. Berdasarkan indikatornya, petani tebu memiliki persepsi yang tinggi atau menyatakan berdampak negatif atas penerapan sistem SPT pada indikator petani mengalami kendala dalam pengadaan pupuk subsidi, biaya pengadaan pupuk

meningkat, dan biaya olah lahan meningkat. Berdasarkan analisis regresi linier berganda seluruh variabel independen secara bersama-sama atau simultan berpengaruh pada variabel persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem SPT. Variabel lama berusaha tani, variabel pendidikan petani dan variabel diversifikasi pekerjaan berpengaruh secara parsial terhadap variabel persepsi petani tebu terhadap penerapan sistem SPT, sementara variabel usia petani, variabel luas lahan, variabel status lahan tidak berpengaruh secara parsial. Variabel usia petani, variabel lama berusaha tani, variabel pendidikan petani, variabel status lahan dan variabel diversifikasi pekerjaan berpengaruh secara positif terhadap persepsi petani tebu, sedangkan variabel luas lahan berpengaruh negatif terhadap persepsi petani tebu.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, Istiko Agus Wicaksono, and Zulfanita. 2012. "Persepsi Petani Tebu Terhadap Program Pengendalian Hama Terpadu (PHT) (Studi Kasus Di Kelompok Tani Santoso Desa Kesidan Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo)." *Surya Agritama* 1(2):12–23.
- Ajatkan, Ahmad Dedy Syathori, and Nikmatul Khoiriyah. 2020. "Farmers ' Perceptions Of The Factors That Influence The Production Of Sugarcane Farming." *SEAGRI: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis* 8(2):105–15.
- Astuti, F.W.; Juita, N. R. .. Ismiasih. 2016. "Kemitraan Usahatani Tebu (Saccharum Officinarum L)Di Kabupaten Purworejoprovinsi Jawa Tengah." *JURNAL MASEPI*, 1(1).
- Badan Pusat Statistik. 2020. *Statistik Tebu Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Situbondo. 2020. *Kabupaten Situbondo Dalam Angka 2020*. Bondowoso: Badan Pusat Statistik.
- Ferhat, Amallia. 2021. "Pengaruh Sistem Pembelian Tebu (Spt) Terhadap Penerimaan Insentif Petani Tebu Di Pabrik Gula (Pg.) Kebun Tebu Mas." *Jurnal Ilmu-Ilmu Pertanian* 28(2):39–47. doi: 10.55259/jiip.v28i2.685.
- Harahap, Malasari, Bambang Sulardiono, and Djoko Suprpto. 2018. "Analisis Tingkat Kematangan Gonad Teripang Keling (Holothuria Atra) Di Perairan Menjangan Kecil, Karimunjava." *Jurnal of Maquares* 7(3):6–7.
- Mamilianti, Wenny. 2020. "Persepsi Petani Terhadap Teknologi Informasi Dan Pengaruhnya Terhadap Perilaku Petani Pada Risiko Harga Kentang." *Agrika* 14(2):125–239. doi: 10.31328/ja.v14i2.1390.
- Maryuliana, Imam Much Ibnu Subroto, and Sam Farisa Chairul Haviana. 2016. "Sistem Informasi Angket Pengukuran Skala Kebutuhan Materi Pembelajaran Tambahan Sebagai Pendukung Pengambilan Keputusan Di Sekolah Menengah Atas Menggunakan Skala Likert." *Jurnal Transistor Elektro Dan Informatika* 1(2):1–12.
- Tunjungsari, Ratna. 2014. "Analisis Produksi Tebu Di Jawa Tengah." *JEJAK* 7(2):120–33. doi: 10.15294/jejak.v7i1.3596.

- Virianita, R., T. Soedewo, S. Amanah, and A. Fatchiya. 2019. "Farmers' Perception to Government Support in Implementing Sustainable Agriculture System." *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia* 24(2):168–77. doi: 10.18343/jipi.24.2.168.
- Wahyuningsih, Tri AMbar, and Fuad Hasan. 2019. "Perception and Participation of Farmers on Usahatani Padi Insurance in Pilangkenceng District, Madiun Regency." *JSEP : Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian* 12(3):11–21.
- Zainuddin, Ahmad, and Rudi Wibowo. 2018. "Analisis Potensi Produksi Tebu Dengan Pendekatan Fungsi Produksi Frontir Di PT Perkebunan Nusantara X." *Pangan* 27(1):33–42.